

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang gencar membangun perekonomiannya demi mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan, suatu anggaran merupakan aspek penting untuk mewujudkan pembangunan yang diharapkan. Salah satu yang dilakukan yaitu berkaitan dengan pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak (Trisnayanti & Jati, 2015). Sumber penerimaan negara dari pajak meliputi pajak dalam negeri dan pajak dari perdagangan internasional. Pajak dalam negeri meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pertumbuhan Ekonomi yang baik merupakan salah satu sasaran utama yang menjadi indikator perbaikan kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menciptakan aktivitas ekonomi dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat yang artinya itu akan semakin mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan berdampak langsung pada kenaikan jumlah pembelanjaan barang dan jasa yang membuat penerimaan PPN pun semakin bertambah. Menurut Departemen Keuangan RI, 2008 terjaganya stabilitas ekonomi akan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan pertumbuhan aktivitas sektor perekonomian yang akan membantu proses perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak telah menetapkan misi fiskal agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut, dengan pajak sebagai komponen strategisnya (Amanda, 2014). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.942,32 triliun (102,51% dari APBN tahun 2018), melebihi target APBN. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017, realisasi pendapatan negara tahun 2018 tersebut meningkat 16,56 %. Penerimaan pajak sebesar Rp 1.315,91 triliun (92,41% dari APBN 2018), atau tumbuh 14,32% dari realisasi tahun 2017. Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2012.

Kegiatan ekonomi merupakan peran penting dalam keberlangsungan suatu negara maka dari itu kestabilan kegiatan perekonomian agar sumber penerimaan dalam hal ini PPN dapat selalu terjaga penerimaannya, harus memperhatikan betul faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro negara. Kegiatan perekonomian dapat berdampak buruk akibat adanya fluktuasi ekonomi makro. Fluktuasi makro yang berlangsung akan berdampak pada penurunan daya beli konsumsi, investasi dan ekspor impor yang mana akan

berdampak pula pada penerimaan PPN. Semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat dalam pembelanjaan barang dan jasa maka akan meningkatkan penerimaan PPN. Pertumbuhan ekonomi sendiri menurut Alex (2012) dikatakan sebagai kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi yang baik dan terus meningkat dikatakan oleh Sukirno (2010) akan memberikan kontribusi pada penerimaan PPN karena pertumbuhan ekonomi yang baik akan menjamin terus terjadinya konsumsi Barang Kena Pajak atau BKP dan Jasa Kena Pajak atau JKP di masyarakat. Maka dari itu menurut Edi (2013) semakin tinggi elastisitas pajak maka semakin tinggi pula pengamanan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari setiap tambahan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat membantu perkembangan rasio pajak. Secara teori, jika pertumbuhan ekonomi suatu negara bertambah karena dorongan dari pembangunan ekonomi itu maka akan mempengaruhi perkembangan rasio pajak. Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ataupun Produk Nasional Bruto (PNB) yang merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah tertentu atau sebuah negara tertentu. PDRB atas dasar harga menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu. PDRB atas dasar harga di gunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan atas dasar harga konstan di gunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Semakin tinggi angka PDRB suatu daerah maka semakin tinggi pendapatan masyarakat dan semakin tinggi pula daya beli atau kemampuan masyarakat untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah termasuk pajak. Apabila PDRB suatu daerah meningkat berarti kemampuan dalam membayar pajak juga ikut meningkat. Dengan kata lain, potensi penerimaan pajak tersebut juga semakin besar. Pernyataan diatas didukung oleh penelitian (Nasrullah, 2015) bahwa terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan PPN dan pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak seharusnya berkorelasi positif. Pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi Indonesia bervariasi begitupun dengan penerimaan pajak khususnya PPN. Kondisi ini tentunya menarik untuk didalami sejauh mana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi penerimaan. Pendapat bahwa salah satu yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak adalah pertumbuhan ekonomi (Herman, 2007) dan (Ratnasari, 2016).

Salah satu yang berperan dalam ekonomi makro ialah tingkat Inflasi. Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara keseluruhan (Case dan Fair dalam Olivia, 2004). Transaksi ekonomi yang merupakan objek penerimaan PPN dapat

dipengaruhi oleh inflasi. Stabilitas dan faktor ekonomi makro seperti inflasi secara positif dapat mempengaruhi penerimaan pajak (Wahyudi, 2009) . Pada tahun 2014 inflasi cukup mendapat perhatian dari masyarakat karena mencapai 8,36% yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak dan kebutuhan rumah tangga (Badan Pusat statistik, 2015). Banyak faktor yang menyebabkan penerimaan PPN tidak mencapai angka yang ditargetkan atau diharapkan. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi berkaitan erat dengan hal tersebut. Kedua variabel tersebut merupakan data yang bersifat fluktuatif yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi penerimaan PPN.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diberlakukan di Indonesia sejak 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap adanya transaksi atas barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi BKP atau JKP dikenakan PPN (Sutedi, 2011). Itu artinya hampir semua barang dan jasa kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan BKP dan JKP yang terutang pada PPN. Fenomena perpajakan yang dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) (Prastowo, 2018) mengemukakan bahwa rendahnya penerimaan PPN karena adanya pergeseran kebiasaan belanja masyarakat menjadi secara online. Pelaku usaha online belum menarik PPN atas barang yang dijualnya, barang yang diimpor juga lolos PPN. Hal ini yang mempengaruhi struktur perekonomian dan penerimaan PPN Indonesia saat ini.

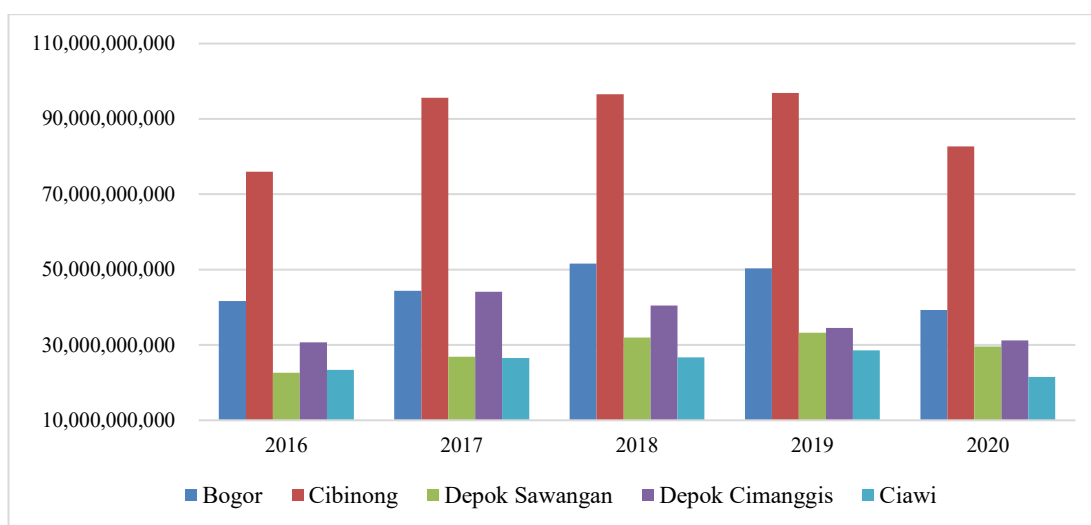
KPP (Kantor Pelayanan Pajak) adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai instansi Direktorat Jenderal Pajak, maka KPP langsung berhubungan dengan Wajib Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 dan telah mengalami perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 206.2/PMK.01/2014 KPP Pratama merupakan unsur pelaksana atau instansi vertikal yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementrian Keuangan. Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III menaungi sebagian besar wilayah Kantor Pajak Pratama di Bekasi Barat, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bogor, Madya Bogor, Cibinong, Ciawi, Depok Sawangan, Depok Cimanggis, Pondok Gede, Cileungsi. Berikut penerimaan PPN pada KPP Pratama Cibinong, Bogor, Depok Sawangan, Depok Cimanggis Dan Ciawi Periode 2016-2020 :

Tabel 1. 1 Data Penerimaan PPN 5 KPP Wilayah Jawa Barat III Tahun 2016-2020

Tahun	Bogor	Cibinong	Depok Sawangan	Depok Cimanggis	Ciawi
2016	41,674,653,230	76,004,135,187	22,627,608,562	30,702,325,328	23,361,619,368
2017	44,407,945,768	95,587,579,680	26,857,297,607	44,081,084,615	26,548,618,013
2018	51,565,064,125	96,582,378,412	31,984,304,377	40,463,022,465	26,691,920,175
2019	50,314,779,815	96,863,957,138	33,281,610,985	34,554,355,830	28,569,314,945
2020	39,274,917,765	82,662,832,334	29,593,735,041	31,202,598,639	21,551,404,363

Sumber : Data DJP Jawa Barat III (2022)

Gambar 1. 1 Grafik Penerimaan PPN 5 KPP Wilayah Jawa Barat III Tahun 2016-2020



Sumber : Data DJP Jawa Barat III (2022)

Melalui data yang disajikan pada tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa penerimaan PPN pada KPP Pratama Cibinong, KPP Pratama Bogor, KPP Pratama Depok Cimanggis, KPP Pratama Depok Sawangan dan KPP Pratama Ciawi periode tahun 2016-2020 bersifat fluktuatif, dimana kenaikan serta penurunan penerimaan PPN memiliki banyak faktor di dalamnya dan pada penelitian ini peneliti akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN yakni pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh (Warniti, 2016), menyatakan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh pada penerimaan PPN. Penelitian (Nasrullah, 2015) dan penelitian (Prasojo, 2015) menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB (Produk domestik regional Bruto) berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Penelitian (Nuryani, 2016) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Penelitian (Rahmawati, 2013) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Penelitian (Saefi Nurfajreani, 2019) menunjukkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN

namun ada pula yang menyatakan kedua atau salah satu variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Penelitian Pada KPP Pratama Cibinong, Bogor, Depok Sawangan, Depok Cimanggis Dan Ciawi Periode 2016-2020)”**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi bahwa kestabilan kegiatan perekonomian agar sumber penerimaan dalam hal ini PPN dapat selalu terjaga penerimaannya harus memperhatikan betul faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro negara. Fluktuasi makro yang terus berlangsung akan berdampak pada penerimaan PPN. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi berperan dalam ekonomi makro yang artinya berperan pula pada keberlangsungan penerimaan PPN.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Cibinong, Bogor, Depok Sawangan, Depok Cimanggis Dan Ciawi Periode 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Cibinong, Bogor, Depok Sawangan, Depok Cimanggis Dan Ciawi Periode 2016-2020?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi secara simultan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Cibinong, Bogor, Depok Sawangan, Depok Cimanggis Dan Ciawi Periode 2016-2020?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi yaitu membuat kesimpulan mengenai “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Cibinong, Bogor, Depok Sawangan, Depok Cimanggis Dan Ciawi Periode 2016-2020”. Selain itu juga sebagai upaya pengembangan dan penerapan ilmu yang didapatkan oleh penulis selama di bangku perkuliahan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Cibinong, Bogor, Depok Sawangan, Depok Cimanggis Dan Ciawi Periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Cibinong, Bogor, Depok Sawangan, Depok Cimanggis Dan Ciawi Periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi secara simultan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Cibinong, Bogor, Depok Sawangan, Depok Cimanggis Dan Ciawi Periode 2016-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak di antaranya adalah KPP Pratama Cibinong, Bogor, Depok Sawangan, Depok Cimanggis dan Ciawi penelitian ini dapat dijadikan masukan dan kontribusi yang positif sebagai dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan yang berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebagai indikator yang berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai akuntansi (khususnya akuntansi perpajakan) sebagai acuan dalam pengembangan ilmu akuntansi, dapat memperkaya penelitian yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan penerimaan pajak pertambahan nilai. Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai sumber dan memunculkan ide serta gagasan baru untuk penelitian selanjutnya.